BAB V
OUTPUT PENELITIAN

A. Ringkasan Eksekutif (*Executive Summary*)

Air merupakan produk alam yang tentunya sangat penting, air merupakan kebutuhan utama orang banyak, dalam hal ini mengenai air telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia NO 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang menyatakan negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan. Penggunaan air digunakan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan orang banyak, maka dari itu hak atas air untuk kebutuhan masyarakat harus terpenuhi untuk kelangsungan hidup orang banyak. Pemerataan air di kota Makassar masih belum dikatakan maksimal, pasalnya masih terdapat daerah yang masih sulit dalam mengakses air bersih, tepatnya di Kecamatan Tallo Kota Makassar, daerah ini masih kesulitan dalam mengakses air bersih apalagi pada musim kemarau yang berkepanjangan, terutama pada daerah Tallo, Kaluku Bodoa, dan Bodoa, di mana daerah ini termasuk dalam daerah pesisir, beberapa di antanya telah membangun sumur bor dan beberapa di antaranya sulit membangun sumur bor dikarenakan air yang asin. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan dalam penanggulangan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang di hadapi PDAM yang berimbas pada masyarakat sebagai orang yang menggunakan air dari PDAM.

B. Pendahuluan

Dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 145 pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa “Bumi dan Air meliputi kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dalam hal ini untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat atas

air harus terpenuhi serta mengikuti aturan dan hukum yang berlaku untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No 17 tahun 2019 tentang sumber daya air dipertegas bahwa negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan. Maka dari itu hak atas air untuk kebutuhan masyarakat harus terpenuhi untuk kelangsungan hidup orang banyak. Kebutuhan atas air bagi masyarakat menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu kualitas dan juga kuantitas atas air bersih sangat dituntut oleh masyarakat.

Penggunaan air bersih menjadi kebutuhan primer dalam kehidupan manusia, dan diketahui bahwa air bersih sangat dituntut untuk selalu tersedia sementara dalam hal ini masih kurangnya pemerataan terhadap air bersih. Sesuai dalam Peraturan Daerah Kota Makassar NO 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar. Pada pasal 3 yang menyebutkan bahwa, perusahaan bertujuan untuk memberikan pelayanan air bersih/air minum dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkesinambungan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan, mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat berdasarkan tata kelola yang baik. Dalam hal ini menjadi tujuan utama dari PDAM untuk dapat memberikan pelayanan dan pemerataan air bersih ke masyarakat secara berkesinambungan.

C. Deskripsi Masalah

Provinsi Sulawesi selatan yang merupakan provinsi terbesar di antara pulau Sulawesi, di mana hal ini mengakibatkan peningkatan produksi air bersih yang disalurkan oleh perusahaan air.

Tabel 11
Jumlah Produksi Air Bersih Kota Makassar

Kota	Air Terproduksi	
	2023	2024
Makassar	8.340.582.17	8,850,178,54

Sumber: PDAM Kota Makassar, 2025

Peningkatan konsumsi air bagi masyarakat utamanya daerah perkotaan menyebabkan peningkatan produksi air yang disalurkan. Di kota Makassar yang merupakan perkotaan besar dengan jumlah penduduk terpadat di Indonesia bagian timur. Di mana peningkatan produksi air yang disalurkan oleh perusahaan air bersih di Kota Makassar pun meningkat.

Di Kecamatan Tallo Kota Makassar yang memiliki jumlah penduduk 148.055 ribu jiwa penduduk dengan jenis kelamin masing-masing 74.581 jiwa laki-laki dan 73.474 jiwa perempuan (Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi selatan 2024). Melihat hal itu dengan banyaknya penduduk di Kecamatan Tallo maka tingkat permintaan akan air bersih juga semakin meningkat di tengah-tengah kepadatan penduduk, sementara itu wilayah ini termasuk wilayah yang rawan krisis air bersih hampir setiap tahun di mana masyarakat yang mengharapkan penyaluran air bersih yang merata mengingat kebutuhan utama masyarakat adalah air bersih untuk kehidupan sehari-sehari. Di samping itu pihak PDAM memiliki kendala yakni pemerataan air yang tidak merata dikarenakan pasokan air baku yang semakin menurun apalagi diakibatkan oleh musim kemarau yang berkepanjangan, selain itu penyebabnya adalah pipa yang sudah tua yang rentan mengalami kebocoran menjadi salah satu penyebab, apabila terjadi kebocoran maka air yang disalurkan bahkan air disalurkan bisa menjadi kotor dan berbau.

Di samping itu, perlunya tindakan cepat oleh PDAM agar dapat memberikan solusi cepat dalam mengatasi permasalahan ini, selain itu diperlukan kesadaran masyarakat untuk bisa bijak dalam hal menghemat air selama keadaan belum stabil. Berkenaan dengan itu perlunya tindakan cepat dari PDAM. Dari observasi yang dilakukan, serta pernyataan dan data yang diberikan oleh PDAM menunjukkan bahwa penyaluran dan pemerataan air yang disalurkan ke wilayah utara kota untuk saat ini masih terus dilakukan agar pemerataan air di wilayah Kecamatan Tallo bisa maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, yang menjadi faktor penyebab krisis air bersih di kecamatan Tallo adalah dikarenakan:

1. Distribusi Air yang Belum Merata

Salah satu masalah utama yang dirasakan masyarakat Kecamatan Tallo adalah distribusi air bersih yang tidak merata. Meskipun sebagian wilayah Kota Makassar telah mendapatkan layanan air bersih dari PDAM dengan cukup lancar, banyak kawasan di Tallo terutama di wilayah pesisir seperti Kelurahan Buloa, Kaluku Bodoa, dan Tallo masih mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air yang bersih. Air sering kali hanya mengalir pada waktu-waktu tertentu, bahkan kadang tidak mengalir sama sekali selama beberapa hari. Padahal dalam Peraturan Daerah Kota Makassar NO 7 Tahun 2019 Tentang Perumda menjelaskan maksud dan tujuan dari PDAM yaitu memberikan pelayanan air bersih dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkesinambungan. Dan tercantum pada misi dari PDAM yakni memberikan pelayanan air minum sesuai standar kesehatan dengan tersedianya air baku yang optimal. Permasalahan ini dipicu oleh dua faktor utama. Pertama, jaringan pipa distribusi PDAM belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah, terutama di bagian utara kota. Kedua, Suplai air baku yang berkurang pada musim kemarau

yang berkepanjangan, di mana wilayah barat Makassar yang merupakan kawasan industri dan komersial sering kali mendapatkan alokasi air lebih besar dibandingkan wilayah pemukiman padat penduduk seperti Tallo.

2. Masyarakat yang terus mengeluhkan Tidak Ada Air

Keluhan mengenai sulitnya akses air bersih merupakan hal yang kerap disuarakan oleh masyarakat Kecamatan Tallo dari waktu ke waktu. Berbagai wawancara yang dilakukan dengan warga di kelurahan Kaluku Bodoa, Buloa, dan Tallo menunjukkan bahwa masalah ini bukan hanya teknis, tetapi juga menyangkut kenyamanan dan kebutuhan dasar sehari-hari yang tidak terpenuhi.

Warga mengaku bahwa air dari PDAM sering kali tidak mengalir, dan terkadang hanya mengalir di jam tertentu, selain itu masyarakat mengeluhkan air yang berbau, beberapa warga menyebut air yang keluar dari kran berbau tak sedap, mirip bau selokan, yang tentu tidak layak digunakan untuk konsumsi maupun kebutuhan rumah tangga lainnya. Kondisi ini memunculkan frustrasi di kalangan masyarakat, karena mereka merasa tidak mendapatkan hak dasar atas air bersih secara layak, adil, dan berkesinambungan. Padahal dalam Peraturan Daerah Kota Makassar NO 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar. Pada pasal 3 yang menyebutkan bahwa, perusahaan bertujuan untuk memberikan pelayanan air bersih/air minum dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkesinambungan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan, mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat berdasarkan tata kelola yang baik. Dalam hal ini PDAM dianggap belum memberikan solusi yang tuntas, mengingat pola keluhan yang sama terus muncul dari tahun ke tahun tanpa perubahan signifikan.

3. PDAM Kekurangan Suplai Air Pada Musim Kemarau

Salah satu akar persoalan krisis air bersih di Kecamatan Tallo adalah menurunnya debit air baku yang disuplai PDAM untuk disalurkan ke wilayah tersebut, yaitu Bendungan Leko pancing. Penurunan ini terjadi terutama saat musim kemarau, ketika musim kemarau tiba menyebabkan penyusutan volume air secara signifikan di bendungan tersebut, Akibatnya, bendungan yang menjadi sumber air baku untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) milik PDAM Kota Makassar mengalami kekeringan, sehingga pasokan air yang tersedia untuk diolah menjadi air bersih pun menjadi sangat terbatas.

Kondisi debit air baku yang tidak stabil ini membuat sistem distribusi PDAM kerap terganggu, terutama untuk daerah yang berada jauh dari instalasi pengolahan atau berada pada wilayah dengan elevasi tinggi seperti pesisir utara Makassar. Maka dari itu, penurunan debit air baku bukan hanya soal volume air yang berkurang, tetapi juga berdampak pada seluruh rantai pelayanan air bersih mulai dari produksi hingga distribusi ke rumah warga.

Fenomena kekurangan suplai air ini menjadi bukti bahwa sistem pengelolaan sumber daya air PDAM masih rentan terhadap perubahan iklim dan musim, dan membutuhkan strategi adaptasi yang lebih kuat, seperti diversifikasi sumber air baku, peningkatan kapasitas penyimpanan, serta peremajaan infrastruktur distribusi.

4. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap masalah utama PDAM

Salah satu permasalahan yang turut memperparah krisis air bersih di Kecamatan Tallo adalah ketidaktahuan masyarakat terhadap permasalahan utama yang dihadapi oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Sebagian besar masyarakat hanya mengetahui dan merasakan dampak dari layanan air

yang buruk, seperti air tidak mengalir, distribusi tidak merata, dan kualitas air yang keruh, namun tidak memahami penyebab mendasarnya. Permasalahan seperti gangguan teknis pada jaringan pipa, rendahnya debit air baku, yang tidak diketahui secara luas oleh warga. Akibat dari ketidaktahuan ini, timbul kesenjangan komunikasi antara masyarakat dan pihak PDAM, yang berdampak pada meningkatnya keluhan yang tidak solutif, rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga infrastruktur air, serta terbatasnya partisipasi publik dalam mendukung upaya perbaikan. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan edukasi dari PDAM mengenai kondisi aktual dan tantangan pengelolaan air bersih membuat masyarakat merasa tidak dilibatkan atau bahkan diabaikan. Hal ini memperburuk persepsi publik terhadap pelayanan air bersih dan dapat memicu konflik sosial serta melemahkan efektivitas kebijakan penanggulangan krisis air yang sedang dijalankan.

D. Rekomendasi Kebijakan

Perlunya upaya dalam mengatasi permasalahan Krisis air bersih di Kecamatan Tallo, terutama untuk menghindari masyarakat yang kesulitan dalam mengakses air bersih, serta meratanya air yang di salurkan ke wilayah utara kota, apalagi pada saat musim kemarau yang akan datang perlunya dilakukan antisipasi. Maka dari itu penanggulangan dalam permasalahan krisis air bersih di kecamatan Tallo perlu ditindaklanjuti agar supaya kedepan nya dapat cepat diatasi. Untuk itu perlu adanya suatu solusi untuk mengatasi hal tersebut:

1. Penambahan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Untuk Meningkatkan Pemerataan Distribusi Air

Salah satu solusi yang perlu dipertimbangkan untuk mengatasi krisis air bersih dan distribusi yang belum merata di Kota Makassar, khususnya di Kecamatan Tallo, adalah dengan menambah Instalasi Pengolahan Air (IPA). Saat

ini, kapasitas produksi air bersih dari IPA yang ada belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, Pasalnya IPA yang dimiliki PDAM yakni IPA II Panaikang mencakup dua wilayah sekaligus yang di mana wilayah tersebut rentan terkena dampak dari krisis air pada saat musim kemarau, daerah tersebut meliputi Utara dan Timur Kota, jadi pada saat musim kemarau tiba penyaluran air ke daerah tersebut dibagi. Hal ini menyebabkan banyak warga hanya mendapat pasokan air dalam jumlah terbatas atau bahkan tidak mendapat air sama sekali. Dengan membangun IPA baru, PDAM akan memiliki tambahan kapasitas untuk memproduksi air bersih yang lebih banyak setiap harinya. IPA baru juga bisa dibangun lebih dekat ke wilayah yang selama ini kurang terlayani, sehingga distribusi air menjadi lebih cepat, tekanan air lebih stabil, dan jangkauan pelayanan bisa diperluas. Pembangunan IPA juga harus dirancang dengan teknologi pengolahan yang lebih efisien dan ramah lingkungan, agar tidak hanya meningkatkan jumlah air, tetapi juga menjaga kualitasnya. Jika kebijakan ini dijalankan secara bertahap dan disertai evaluasi berkala, maka permasalahan air bersih yang selama ini menjadi keluhan masyarakat dapat teratasi secara berkelanjutan.

2. Peningkatan Aksebilitas dan Kualitas Layanan PDAM

Keluhan masyarakat yang tidak mendapatkan pasokan air bersih secara merata menjadi indikator bahwa layanan PDAM masih belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah yang berada di ujung jaringan distribusi seperti Kecamatan Tallo. Permasalahan ini menunjukkan bahwa aksesibilitas terhadap layanan air bersih masih terbatas dan kualitas pelayanannya belum memadai, baik dari segi kontinuitas distribusi maupun tekanan air yang rendah. Oleh karena itu, PDAM Kota Makassar bersama pemerintah daerah perlu melakukan peningkatan aksesibilitas layanan dengan

memperluas jaringan distribusi air ke wilayah-wilayah yang belum terlayani secara optimal. Langkah ini dapat berupa pembangunan jaringan pipa baru, serta pemasangan perangkat penambah tekanan (*booster pump*) di daerah yang sering mengalami tekanan rendah.

Di samping itu, kualitas pelayanan juga perlu ditingkatkan dengan memastikan distribusi air berlangsung secara teratur dan tidak bergilir tanpa pemberitahuan. PDAM perlu memperkuat sistem pengaduan masyarakat agar respons terhadap keluhan bisa lebih cepat dan tepat sasaran. Pelayanan yang transparan, profesional, dan mudah diakses akan mendorong kepercayaan masyarakat terhadap instansi penyedia air bersih.

3. Penampungan Dan Pemanfaatan Air Hujan *(Rainwater Harvesting)*

Dalam hal ini PDAM bisa membangun sistem pemanfaatan air hujan (*Rainwater Harvesting*) secara langsung di area-area yang dimiliki atau dikelola oleh PDAM, seperti kantor pusat, instalasi pengolahan air (IPA), gudang, atau reservoir. Sistem ini dilakukan dengan cara menampung air hujan dari atap bangunan menggunakan saluran talang dan menyimpannya ke dalam tangki atau kolam penampungan yang berkapasitas besar. Air hujan yang ditampung akan diproses melalui sistem penyaringan sederhana agar bisa digunakan sebagai cadangan air bersih. Air ini kemudian dapat didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak krisis air, baik melalui jaringan distribusi yang ada maupun dengan bantuan mobil tangki PDAM.

PDAM juga dapat bekerja sama dengan pemerintah kota atau pihak swasta untuk menambah lokasi penampungan air hujan di fasilitas umum atau gedung besar milik pemerintah. Semua air yang terkumpul akan dikelola PDAM dan digunakan saat terjadi gangguan suplai atau saat musim kemarau panjang. Dengan cara ini, PDAM memiliki tambahan sumber air yang dapat dimanfaatkan

kapan saja, dan masyarakat yang mengalami kesulitan air tetap bisa mendapatkan pasokan air bersih melalui layanan resmi PDAM.

4. Program Literasi Air Bersih Bagi Masyarakat

Program Literasi Air Bersih Bagi Masyarakat adalah rekomendasi kebijakan yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait proses pengelolaan, distribusi, dan tantangan yang dihadapi PDAM dalam menyediakan air bersih. Program ini lahir dari masalah ketidaktahuan masyarakat terhadap persoalan utama PDAM, seperti keterbatasan sumber daya, gangguan teknis. Melalui program ini, PDAM dapat menyampaikan informasi secara terbuka dan mudah dipahami, baik melalui penyuluhan langsung di lingkungan warga, media sosial, video edukatif, maupun kerja sama dengan sekolah dan tokoh masyarakat. Dengan adanya literasi ini, warga akan lebih memahami kondisi sebenarnya di lapangan dan menjadi lebih bijak dalam menggunakan air.

Di mana kebijakan ini menciptakan kesadaran dan pemahaman publik agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga menjadi bagian dari solusi dalam menjaga dan mendukung pelayanan air bersih. Agar meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap PDAM, berkurangnya keluhan akibat miskomunikasi, dan terbentuknya kolaborasi yang lebih baik antara PDAM dan masyarakat dalam menjaga ketersediaan air bersih, terutama di saat-saat krisis.

E. Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. 2024. “Kecamatan Tallo Dalam Angka2024.”Https://Makassarkota.Bps.Go.Id/Id/Publication/2024/09/26/9c9552a980f9cb4bfedf4e3f/Kecamatan-Tallo-Dalam-Angka-2024.Html. 2024.

Peraturan Daerah Kota Makassar NO 7 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar

Undang-Undang Republik Indonesia No 17 tahun 2019. 2019. “Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.” *Jdih Bpk Ri Database Peraturan*, no. 011594, 50

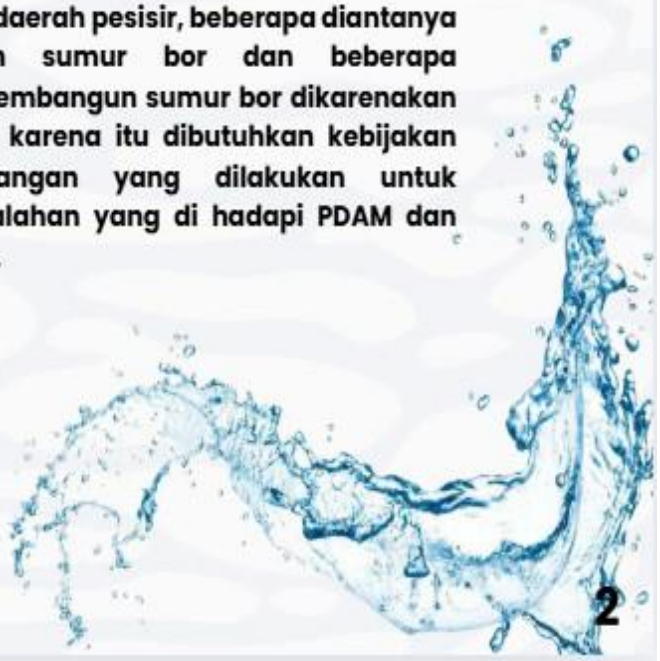
F. Infografis *Policy Brief*

Gambar 13
Karya *Policy Brief*



RINGKASAN EKSEKUTIF

Air merupakan produk alam yang tentunya sangat penting, air merupakan kebutuhan utama orang banyak, dalam hal ini mengenai air telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang menyatakan negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan. Penggunaan air digunakan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan orang banyak, maka dari itu hak atas air untuk kebutuhan masyarakat harus terpenuhi untuk kelangsungan hidup orang banyak. Pemerataan air di kota Makassar masih belum dikatakan maksimal, pasalnya masih terdapat daerah yang masih sulit dalam mengakses air bersih, tepatnya di Kecamatan Tallo Kota Makassar, daerah ini masih kesulitan dalam mengakses air bersih apalagi pada musim kemarau yang berkepanjangan, terutama pada daerah Tallo, Kaluku Bodoa, dan Bodoa, dimana daerah ini termasuk dalam daerah pesisir, beberapa diantanya telah membangun sumur bor dan beberapa diantaranya sulit membangun sumur bor dikarenakan air yang asin. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan dalam penanggulangan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang di hadapi PDAM dan masyarakat saat ini.



PENDAHULUAN



Dalam Undang undang Dasar Republik Indonesia Tahun 145 pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa "Bumi dan Air meliputi kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Dalam hal ini untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat atas air harus terpenuhi serta mengikuti aturan dan hukum yang berlaku untuk kesejahteraan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 17 tahun 2019 tentang sumber daya air dipertegas bahwa negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan. Maka dari itu hak atas air untuk kebutuhan masyarakat harus terpenuhi untuk kelangsungan hidup orang banyak. Kebutuhan atas air bagi masyarakat menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu kualitas dan juga kuantitas atas air bersih sangat dituntut oleh masyarakat.

Penggunaan air bersih menjadi kebutuhan primer dalam kehidupan manusia, dan diketahui bahwa air berish sangat dituntut intuk selalu tersedia sementara dalam hal ini masih kurangnya pemerataan terhadap air bersih. Sesuai dalam Peraturan Daerah Kota Makassar No 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar. Pada pasal 3 yang menyebutkan bahwa, perusahaan bertujuan untuk memberikan pelayanan air bersih/air minum dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkesinambungan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan, mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat berdasarkan tata kelola yang baik. Dalam hal ini menjadi tujuan utama dari PDAM untuk dapat memberikan pelayanan dan pemerataan air bersih ke masyarakat secara berkesinambungan.

DESKRIPSI MASALAH

POLITEKNIK STIA LAN MAKASSAR

Peningkatan konsumsi air bagi masyarakat utamanya daerah perkotaan menyebabkan peningkatan pproduksi air yang disalurkan. Di kota Makassar yang merupakan perkotaan besar dengan jumlah penduduk terpadat di indonesia bagian timur. Dimaan peningkatan produksi air yang disalurkan oleh perusahaan air bersih di Kota Makassar pun meningkat.

Di kecamatan Tallo Kota Makassar yang memiliki jumlah penduduk 148.055 ribu jiwa penduduk dengan jenis kelamin masing-masing 74.581 jiwa laki-laki dan 73.474 jiwa perempuan (Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi selatan 2024). Melihat hal itu dengan banyaknya penduduk di kecamatan Tallo maka tingkat permntaan akan air bersih juga semakin meningkat di tengah-tengah kepadatan penduduk, semantara itu wilayah ini termasuk wilayah yang rawan krisis air bersih hampir setiap tahun dimana masyarakat yang mengharapkan penyaluran air bersih yang merata mengingat kebutuhan utama masyarakat adalah air bersih untuk kehidupan sehari-sehari. Disamping itu pihak PDAM memiliki kendala yakni pemrataan air yang tidak merata dikarenakan pasokan air baku yang semakin menurun apalagi diakibatkan oleh musim kemarau yang datangm, selain itu penyebabnya adalah pipa yang sudah tua yang rentan mengalami kebocoran menjadi salah satu penyebab, apabila terjadi kebocoran maka air yang disalurkan bahkan air disalurkan bisa menjadi kotor dan berbau.

Adapun yang menjadi faktor penyebab krisis air bersih di kecamatan Tallo adalah dikarenakan:

1 DISTRIBUSI AIR YANG BELUM MERATA

Salah satu masalah utama yang dirasakan masyarakat Kecamatan Tallo adalah distribusi air bersih yang tidak merata. Meskipun sebagian wilayah Kota Makassar telah mendapatkan layanan air bersih dari PDAM dengan cukup lancar, banyak kawasan di Tallo terutama di wilayah pesisir seperti Kelurahan Buloa, Kaluku Bodoa, dan Tallo masih mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air yang bersih. Air sering kali hanya mengalir pada waktu-waktu tertentu, bahkan kadang tidak mengalir sama sekali selama beberapa hari. Padahal dalam Peraturan Daerah Kota Makassar No 7 Tahun 2019 Tentang Perumda menjelaskan maksud dan tujuan dari PDAM yaitu memberikan pelayanan air bersih dalama rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkesinambungan. Dan tercantum pada misi dari PDAM yakni memberikan pelayanan air minum sesuai standar kesehatan dengan tersedianya air baku yang optimal.

Permasalahan ini dipicu oleh dua faktor utama. Pertama, jaringan pipa distribusi PDAM belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah, terutama di bagian utara kota. Kedua, Suplai air baku yang berkurang pada musim kemarau yang berkepanjangan, di mana wilayah barat Makassar yang merupakan kawasan industri dan komersial sering kali mendapatkan alokasi air lebih besar dibandingkan wilayah pemukiman padat penduduk seperti Tallo.

2 MASYARAKAT YANG TERUS MENGELUHKAN TIDAK ADA AIR

Keluhan mengenai sulitnya akses air bersih merupakan hal yang kerap disuarakan oleh masyarakat Kecamatan Tallo dari waktu ke waktu. Berbagai wawancara yang dilakukan dengan warga di kelurahan Kaluku Bodoa, Buloa, dan Tallo menunjukkan bahwa masalah ini bukan hanya teknis, tetapi juga menyangkut kenyamanan dan kebutuhan dasar sehari-hari yang tidak terpenuhi.

Warga mengaku bahwa air dari PDAM sering kali tidak mengalir, dan terkadang hanya mengalir di jam tertentu, selain itu masyarakat mengeluhkan air yang berbau, beberapa warga menyebut air yang keluar dari kran berbau tak sedap, mirip bau selokan, yang tentu tidak layak digunakan untuk konsumsi maupun kebutuhan rumah tangga lainnya. Kondisi ini memunculkan frustrasi di kalangan masyarakat, karena mereka merasa tidak mendapatkan hak dasar atas air bersih secara layak, adil, dan berkesinambungan. Padahal dalam Peraturan Daerah Kota Makassar No 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar. Pada pasal 3 yang menyebutkan bahwa, perusahaan bertujuan untuk memberikan pelayanan air bersih/air minum dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkesinambungan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan, mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat berdasarkan tata kelola yang baik. Dalam hal ini PDAM dianggap belum memberikan solusi yang tuntas, mengingat pola keluhan yang sama terus muncul dari tahun ke tahun tanpa perubahan signifikan.

3 PDAM KEKURANGAN SUPLAI AIR PADA MUSIM KEMARAU

Salah satu akar persoalan krisis air bersih di Kecamatan Tallo adalah menurunnya debit air baku yang disuplai PDAM untuk disalurkan ke wilayah tersebut, yaitu Bendungan Lekopancing. Penurunan ini terjadi terutama saat musim kemarau, ketika musim kemarau tiba menyebabkan penyusutan volume air secara signifikan di bendungan tersebut, Akibatnya, bendungan yang menjadi sumber air baku untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) milik PDAM Kota Makassar mengalami kekeringan, sehingga pasokan air yang tersedia untuk diolah menjadi air bersih pun menjadi sangat terbatas. Kondisi debit air baku yang tidak stabil ini membuat sistem distribusi PDAM kerap terganggu, terutama untuk daerah yang berada jauh dari instalasi pengolahan atau berada pada wilayah dengan elevasi tinggi seperti pesisir utara Makassar. Maka dari itu, penurunan debit air baku bukan hanya soal volume air yang berkurang, tetapi juga berdampak pada seluruh rantai pelayanan air bersih mulai dari produksi hingga distribusi ke rumah warga.

Fenomena kekurangan suplai air ini menjadi bukti bahwa sistem pengelolaan sumber daya air PDAM masih rentan terhadap perubahan iklim dan musim, dan membutuhkan strategi adaptasi yang lebih kuat, seperti diversifikasi sumber air baku, peningkatan kapasitas penyimpanan, serta peremajaan infrastruktur distribusi.

4 KURANGNYA PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP MASALAH UTAMA PDAM

Salah satu permasalahan yang turut memperparah krisis air bersih di Kecamatan Tallo adalah ketidaktahuan masyarakat terhadap permasalahan utama yang dihadapi oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Sebagian besar masyarakat hanya mengetahui dan merasakan dampak dari layanan air yang buruk, seperti air tidak mengalir, distribusi tidak merata, dan kualitas air yang keruh, namun tidak memahami penyebab mendasarnya. Permasalahan seperti gangguan teknis pada jaringan pipa, rendahnya debit air baku, yang tidak diketahui secara luas oleh warga. Akibat dari ketidaktahuan ini, timbul kesenjangan komunikasi antara masyarakat dan pihak PDAM, yang berdampak pada meningkatnya keluhan yang tidak solutif, rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga infrastruktur air, serta terbatasnya partisipasi publik dalam mendukung upaya perbaikan. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan edukasi dari PDAM mengenai kondisi aktual dan tantangan pengelolaan air bersih membuat masyarakat merasa tidak dilibatkan atau bahkan diabaikan. Hal ini memperburuk persepsi publik terhadap pelayanan air bersih dan dapat memicu konflik sosial serta melemahkan efektivitas kebijakan penanggulangan krisis air yang sedang dijalankan.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

POLITEKNIK STIA LAN MAKASSAR

Perlunya upaya dalam mengatasi permasalahan Krisis air bersih di Kecamatan Tallo, terutama untuk menghindari masyarakat yang kesulitan dalam mengakses air bersih, serta meratanya air yang di salurkan ke wilayah utara kota, apalagi pada saat musim kemarau yang akan datang perlunya dilakukan antisipasi. Maka dari itu penanggulangan dalam permasalahan krisis air bersih di kecamatan Tallo perlu ditindaklanjuti agar supaya kedepannya dapat cepat diatasi. Untuk itu perlu adanya suatu solusi untuk mengatasi hal tersebut:

1. Penambahan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Untuk Meningkatkan Pemerataan Distribusi Air

Salah satu solusi yang perlu dipertimbangkan untuk mengatasi krisis air bersih dan distribusi yang belum merata di Kota Makassar, khususnya di Kecamatan Tallo, adalah dengan menambah Instalasi Pengolahan Air (IPA). Saat ini, kapasitas produksi air bersih dari IPA yang ada belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, Pasalnya IPA yang dimiliki PDAM yakni IPA II Panaikang mencakup dua wilayah sekaligus yang dimana wilayah tersebut rentan terkena dampak dari krisis air pada saat musim kemaru, daerah tersebut meliputi Utara dan Timur Kota, jadi pada saat musim kemarau tiba penyaluran air ke daerah tersebut dibagi. Hal ini menyebabkan banyak warga hanya mendapat pasokan air dalam jumlah terbatas atau bahkan tidak mendapat air sama sekali. Dengan membangun IPA baru, PDAM akan memiliki tambahan kapasitas untuk memproduksi air bersih yang lebih banyak setiap harinya. IPA baru juga bisa dibangun lebih dekat ke wilayah yang selama ini kurang terlayani, sehingga distribusi air menjadi lebih cepat, tekanan air lebih stabil, dan jangkauan pelayanan bisa diperluas. Pembangunan IPA juga harus dirancang dengan teknologi pengolahan yang lebih efisien dan ramah lingkungan, agar tidak hanya meningkatkan jumlah air, tetapi juga menjaga kualitasnya. Jika kebijakan ini dijalankan secara bertahap dan disertai evaluasi berkala, maka permasalahan air bersih yang selama ini menjadi keluhan masyarakat dapat teratasi secara berkelanjutan.

2. Peningkatan Aksebilitas dan Kualitas Layanan PDAM

Keluhan masyarakat yang tidak mendapatkan pasokan air bersih secara merata menjadi indikator bahwa layanan PDAM masih belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah yang berada di ujung jaringan distribusi seperti Kecamatan Tallo. Permasalahan ini menunjukkan bahwa aksesibilitas terhadap layanan air bersih masih terbatas dan kualitas pelayanannya belum memadai, baik dari segi kontinuitas distribusi maupun tekanan air yang rendah. Oleh karena itu, PDAM Kota Makassar bersama pemerintah daerah perlu melakukan peningkatan aksesibilitas layanan dengan memperluas jaringan distribusi air ke wilayah-wilayah yang belum terlayani secara optimal. Langkah ini dapat berupa pembangunan jaringan pipa baru, serta pemasangan perangkat penambah tekanan (booster pump) di daerah yang sering mengalami tekanan rendah.

Di samping itu, kualitas pelayanan juga perlu ditingkatkan dengan memastikan distribusi air berlangsung secara teratur dan tidak bergilir tanpa pemberitahuan. PDAM perlu memperkuat sistem pengaduan masyarakat agar respons terhadap keluhan bisa lebih cepat dan tepat sasaran. Pelayanan yang transparan, profesional, dan mudah diakses akan mendorong kepercayaan masyarakat terhadap instansi penyedia air bersih.

3. Penampungan Dan Pemanfaatan Air Hujan (Rainwater Harvesting)

Dalam hal ini PDAM bisa membangun sistem pemanfaatan air hujan (Rainwater Harvesting) secara langsung di area-area yang dimiliki atau dikelola oleh PDAM, seperti kantor pusat, instalasi pengolahan air (IPA), gudang, atau reservoir. Sistem ini dilakukan dengan cara menampung air hujan dari atap bangunan menggunakan saluran talang dan menyimpannya ke dalam tangki atau kolam penampungan yang berkapasitas besar. Air hujan yang ditampung akan diproses melalui sistem penyaringan sederhana agar bisa digunakan sebagai cadangan air bersih. Air ini kemudian dapat didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak krisis air, baik melalui jaringan distribusi yang ada maupun dengan bantuan mobil tangki PDAM.

PDAM juga dapat bekerja sama dengan pemerintah kota atau pihak swasta untuk menambah lokasi penampungan air hujan di fasilitas umum atau gedung besar milik pemerintah. Semua air yang terkumpul akan dikelola PDAM dan digunakan saat terjadi gangguan suplai atau saat musim kemarau panjang. Dengan cara ini, PDAM memiliki tambahan sumber air yang dapat dimanfaatkan kapan saja, dan masyarakat yang mengalami kesulitan air tetap bisa mendapatkan pasokan air bersih melalui layanan resmi PDAM.

4. Program Literasi Air Bersih Bagi Masyarakat

Program Literasi Air Bersih Bagi Masyarakat adalah rekomendasi kebijakan yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait proses pengelolaan, distribusi, dan tantangan yang dihadapi PDAM dalam menyediakan air bersih. Program ini lahir dari masalah ketidaktahuan masyarakat terhadap persoalan utama PDAM, seperti keterbatasan sumber daya, gangguan teknis. Melalui program ini, PDAM dapat menyampaikan informasi secara terbuka dan mudah dipahami, baik melalui penyuluhan langsung di lingkungan warga, media sosial, video edukatif, maupun kerja sama dengan sekolah dan tokoh masyarakat. Dengan adanya literasi ini, warga akan lebih memahami kondisi sebenarnya di lapangan dan menjadi lebih bijak dalam menggunakan air.

Dimana kebijakan ini menciptakan kesadaran dan pemahaman publik agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga menjadi bagian dari solusi dalam menjaga dan mendukung pelayanan air bersih. Agar meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap PDAM, berkurangnya keluhan akibat miskomunikasi, dan terbentuknya kolaborasi yang lebih baik antara PDAM dan masyarakat dalam menjaga ketersediaan air bersih, terutama di saat-saat krisis



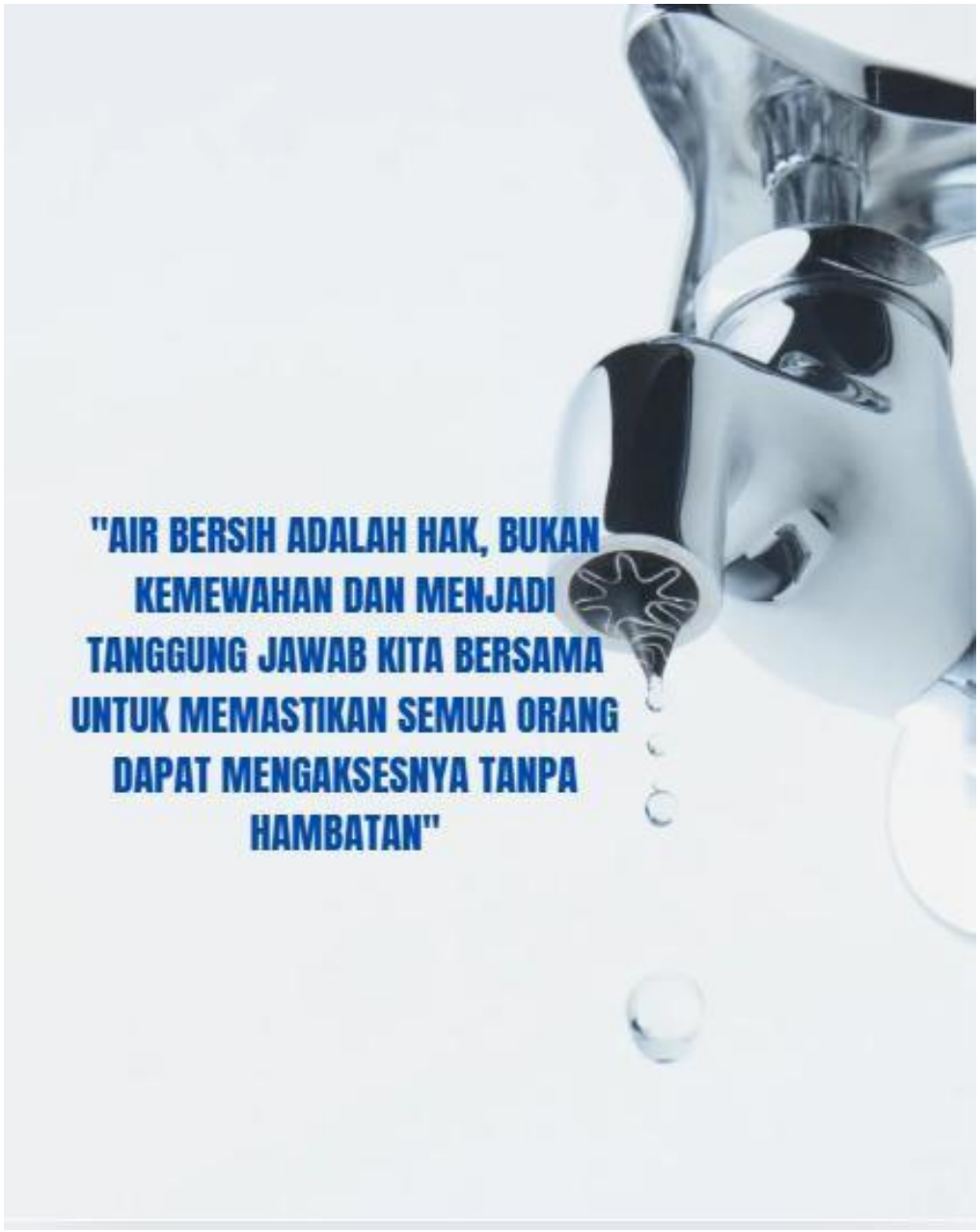
9

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. 2024. "Kecamatan Tallo Dalam Angka2024."Https://Makassarkota.Bps.Go.Id/Id/Publication/2024/09/26/9c9552a980f9cb4bfedf4e3f/Kecamatan-Tallo-Dalam-Angka-2024.Html. 2024.

Peraturan Daerah Kota Makassar No 7 Tahun 2019 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Makassar

Undang-Undang Republik Indonesia No 17 tahun 2019. 2019. "Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air." Jdih Bpk Ri Database Peraturan, no. 011594, 50.



Sumber : Hasil Penelitian, 2025